

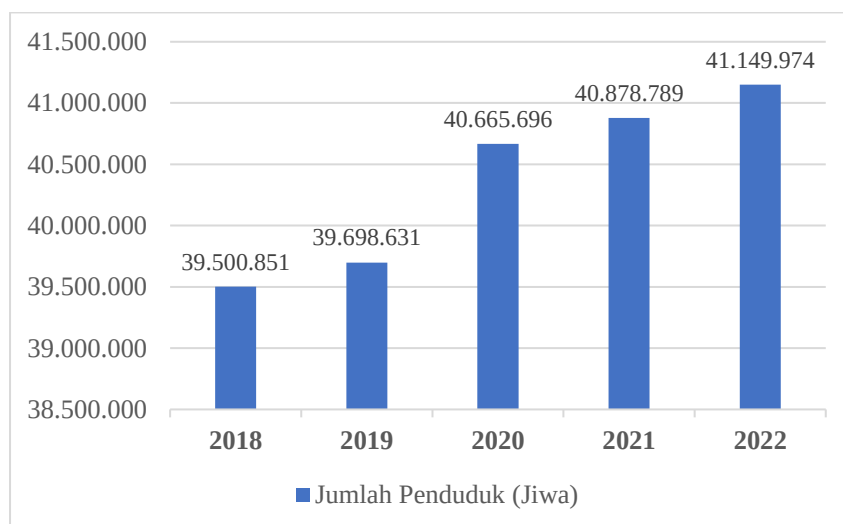
BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang jumlah penduduknya tertinggi di pulau Jawa setelah provinsi Jawa Tengah. Tercatat pada situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2022 penduduk provinsi Jawa Timur berjumlah 41.149.974 jiwa. Diantaranya berjenis kelamin laki-laki berjumlah 20.525.756 jiwa dan perempuan berjumlah 20.624.218 jiwa. Berikut ini grafik persebaran jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022:

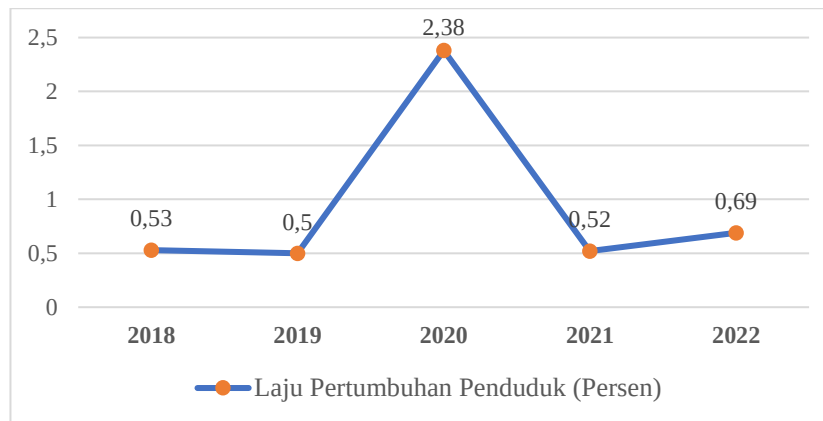
Grafik 1.1
Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur (Jiwa) Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

Berdasarkan data pada Grafik 1.1 diatas, jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2022 sebanyak 41,15 juta jiwa. Apabila dibandingkan jumlah penduduk saat Sensus penduduk pada tahun-tahun sebelumnya dan menjadikan tahun 2018 (39,50 juta jiwa) menjadi tahun dasar, maka jumlah penduduk Jawa Timur mengalami pertumbuhan sekitar 0,92 persen per tahun. Melihat besaran laju pertumbuhan penduduk (LPE) dapat dihitung menggunakan rumus statistik, dengan hasil seperti di grafik 1.2 bawah ini:

Grafik 1.2
Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Timur (Persen) Tahun 2018-2022



Dilihat pada grafik 1.2, Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Timur di atas, jumlah penduduk provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan rata-rata 0,92 persen setiap tahun dengan tahun 2018 sebagai tahun dasar. Sedangkan laju pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2020, bertumbuh 1,88 persen dari tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena, saat pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali pulang ke kampung halamannya.

Jika dilihat pada setiap kabupaten/kota berada di provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk tertinggi setelah kabupaten Nganjuk mendapat urutan No. 19 dari 38 kabupaten/kota berada dalam wilayah provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung dengan luas daerahnya 1.055,56 km² jika dibandingkan jumlah penduduk, maka kepadatan jumlah penduduk di kabupaten Tulungagung saat ini pada tahun 2022 tercatat berkisar 1.050 jiwa per kilometer persegi.

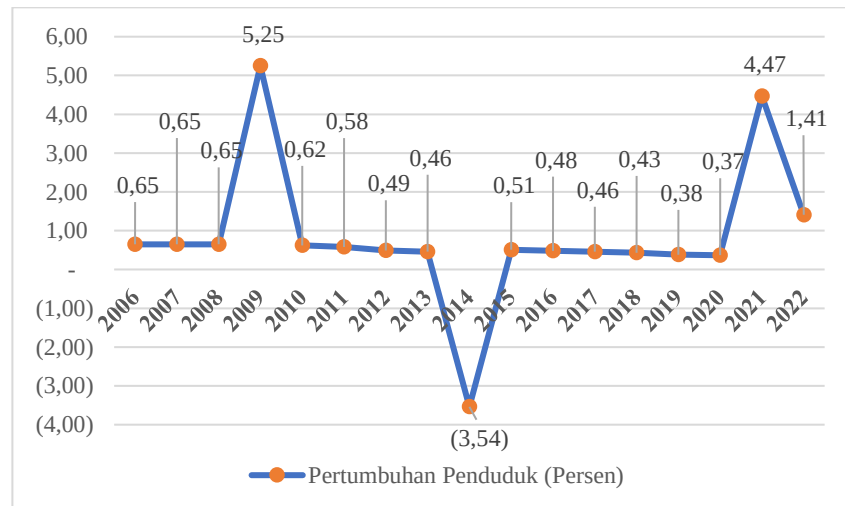
Tabel 1.1
Nilai Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung Periode 2006-2022

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2006	966.826
2007	973.131
2008	979.480
2009	1.030.926
2010	1.037.369
2011	1.043.385
2012	1.048.472
2013	1.053.276
2014	1.015.974
2015	1.021.190
2016	1.026.101
2017	1.030.790
2018	1.035.290
2019	1.039.284
2020	1.043.182
2021	1.089.775
2022	1.105.337

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, bahwa data selama 16 tahun menunjukkan bahwa setiap tahunnya Kabupaten Tulungagung jumlah penduduknya terus meningkat. Sedangkan data pada tahun 2014 memperlihatkan nilai jumlah penduduk yang menyusut dari 1.053.276 pada tahun 2013, menjadi 1.015.974 jiwa pada tahun 2014. Untuk melihat besaran laju pertumbuhan penduduk, dapat dihitung dengan menggunakan rumus Laju Pertumbuhan Penduduk di atas tadi. Jika dihitung dengan menggunakan rumus Laju Pertumbuhan Penduduk, maka hasil pertumbuhan penduduk selama 16 tahun kabupaten Tulungagung ialah, sebagai berikut:

Grafik 1.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tulungagung (Persen)
Periode 2006-2022



Pada tabel 1.4 Laju Pertumbuhan Penduduk di atas, tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulungagung meningkat dengan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduknya adalah naik 0,86 persen setiap tahunnya. Sedangkan, pertumbuhan penduduk berkurang pada tahun 2014 sebesar -3,54.

Pertumbuhan penduduk mampu mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Sebagai dampak dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah. Adanya spesialisasi dan pembagian kerja diantara para tenaga kerja akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi sedangkan permasalahan dalam kepadatan penduduk adalah persebaran tidak merata diantara Kecamatan yang berada di Kabupaten Tulungagung. Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakatnya. Pada daerah dengan kepadatan tinggi, usaha meningkatkan kualitas penduduk akan lebih sulit dilakukan. Hal ini menimbulkan permasalahan social ekonomi,

kesejahteraan, keamanan, ketersediaan lahan, air bersih, dan kebutuhan pangan.

Dampak paling besar yaitu kerusakan lingkungan. Semua kebutuhan manusia dipenuhi dari lingkungan, karena lingkungan merupakan Sumber Daya Alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan pangan, papan, air bersih, udara bersih, dan kebutuhan lainnya.² Melihat dari pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulungagung semakin meningkat setiap tahunnya, ini memiliki potensi untuk menjadi Sumber Daya Manusia yang siap diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dengan instrumen Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indikator untuk mengukur kesejahteraan pemberdayaan manusia dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia memiliki andil dalam usaha pengurangi tingkat pengangguran. Kualitas hidup manusia yang baik akan menjadi faktor pendukung rendahnya jumlah penduduk miskin. Semakin tinggi data yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia maka akan memperlihatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat semakin baik.

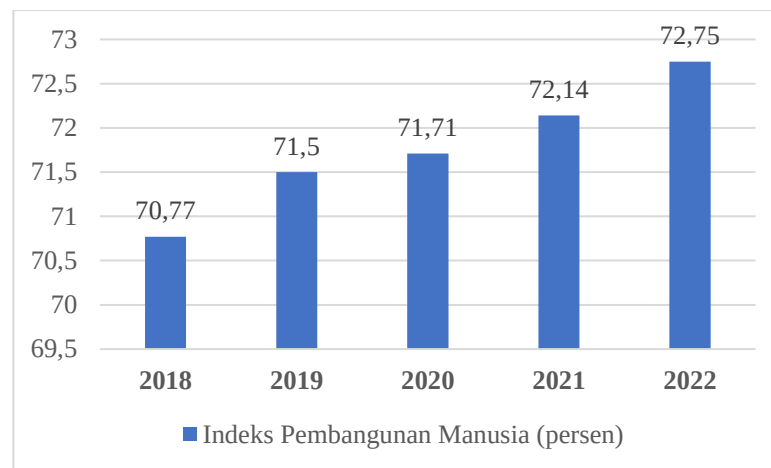
Indeks Pembangunan Manusia merupakan cerminan dari kualitas Sumber Daya Manusia. Apabila Indeks Pembangunan Manusia memperlihatkan tingkat yang rendah maka akan menyebabkan rendahnya produktivitas kerja dari penduduk, sehingga percuma saja apabila jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi sedangkan Indeks Pembangunan Manusia rendah, karena Sumber Daya Manusia dipekerjakan tidak dapat bekerja dengan produktif sehingga ini akan mempengaruhi juga produksi

² Dwi Yunianto, Analisis Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 23 No. 4, 2021, hlm. 688.

barang dan jasa (PDRB) dalam hal ini mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut berita resmi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, bahwa dalam satu lustrum ini pembangunan manusia di Jawa Timur terus mengalami kemajuan, Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur meningkat dari 70,77 persen pada tahun 2018 menjadi 72,75. Berikut Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur periode satu lustrum:

Grafik 1.4
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur (Persen)
Periode 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Jadi, berdasarkan data grafik 1.4, dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur periode 2018-2022 telah menunjukkan perkembangannya yang setiap tahun mengalami peningkatan. Selama periode tersebut, Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur rata-rata tumbuh sebesar 0,71 persen per tahun dan masih bertahan di level tertinggi sejak tahun 2018.

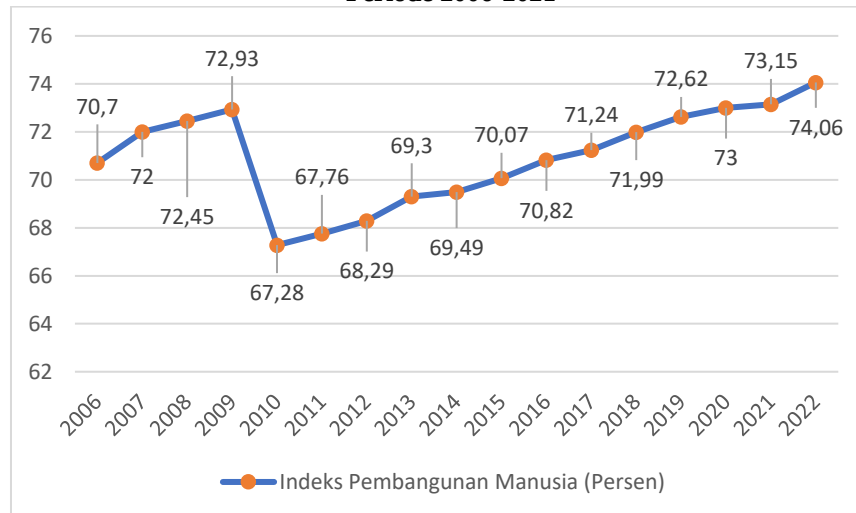
Namun Indeks Pembangunan Jawa Timur saat terjadinya pandemi Covid-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2021 tercatat 72,14 atau tumbuh 0,60 persen, menguat dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Adapun capaian tahun

2022, Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur mencapai 72,75 persen atau tumbuh sebesar 0,85 persen terhadap tahun 2021. Perlambatan capaian Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan komponen pengeluaran per kapita setiap tahunnya yang disesuaikan, sedangkan komponen lainnya masih tetapi tumbuh positif, setelah intensitas pandemi Covid-19 di Indonesia berangsur menurun terutama pada tahun 2022, geliat ekonomi memulih dan menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2021 mengalami peningkatan.

Menurut Mulyadi (2012) peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan antara lain melalui pembangunan pendudukan yang dibarengi dengan pembangunan ekonomi dimasa akan datang, pembangunan Kesehatan dengan cara menumbuhkan budaya hidup sehat serta kualitas dari pelayanan Kesehatan itu sendiri, sedangkan untuk penduduk pengangguran dapat dilaksanakan dengan memberikan pelatihan keterampilan praktis guna ilmu dalam pekerjaan.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tulungagung saat pandemi Covid-19 mengalami peningkatan masuk pada kategori tinggi. Dimana, pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan 73,00 dan tahun 2021 menjadi sebesar 73,15 atau meningkat sebesar 0,15, dan pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia kabupaten Tulungagung meningkat tergolong tinggi ke 74,06 atau meningkat 0,91 pada tahun sebelumnya 2021. Namun Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tulungagung tahun ke tahun sebelumnya menunjukkan nilai yang berfluktuasi, dapat dilihat melalui tabel berikut:

Grafik 1.5
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tulungagung (Persen)
Periode 2006-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan data dari grafik 1.5, dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2006-2022. Penurunan yang tinggi terjadi pada tahun 2010, dengan memiliki selisih 5,65. Sebelumnya indeks pembangunan manusia 72,93 pada tahun 2009 menjadi 67,28 pada tahun 2010. Namun begitu, tingkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tulungagung mulai tahun 2010 terus meningkat hingga tahun-tahun selanjutnya. Dari tabel di atas, tingkat Indeks Pembangunan Manusia tertinggi menunjukkan nilai 74,06 yaitu pada periode tahun terakhir (2022).

Pencapaian tujuan pembangunan manusia dalam hal ini ialah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia bukanlah hal baru bagi Indonesia dan selalu ada penekanan pada pemenuhan tersebut, yakni pemenuhan Pendidikan universal, peningkatan kesehatan, dan pemberantasan kemiskinan.³

Kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia yang dapat tercapai jika

³ Decta Pitron Lugastoro, Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Jawa Timur, *Jurnal Ilmiah*, <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/639>

produktivitas dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Membahas tentang laju pertumbuhan penduduk, kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, tentu tidak terlepas mengenai tema desentralisasi fiskal. Secara konseptual, desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan besarnya sesuai dengan beban kewenangan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah pusat berkewajiban untuk menjamin sumber keuangan atas pendelegasian tugas dan wewenang dari pusat ke daerah. Sumber pembiayaan salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁴

Secara teoritis tujuan dari desentralisasi adalah menciptakan pemerintah yang efektif dan efisien, dalam membangun demokrasi lokal dan menghargai keragaman lokal, dan tujuan akhirnya adalah menciptakan kesejahteraan rakyat. Dalam memaksimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah akan membiayai pengeluaran publik seperti Pendidikan, kesehatan, dan pelayanan lainnya melalui penerimaan daerahnya, sehingga pengeluaran publik suatu daerah pada era desentralisasi fiskal bergantung kepada penerimaan daerah, salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Oates desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional atau pemerintah daerah akan lebih efisien dalam penyediaan barang-barang publik. Oates juga mengatakan bahwa desentralisasi fiskal juga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi.⁵

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan yang sangat signifikan didalam pembangunan suatu daerah.

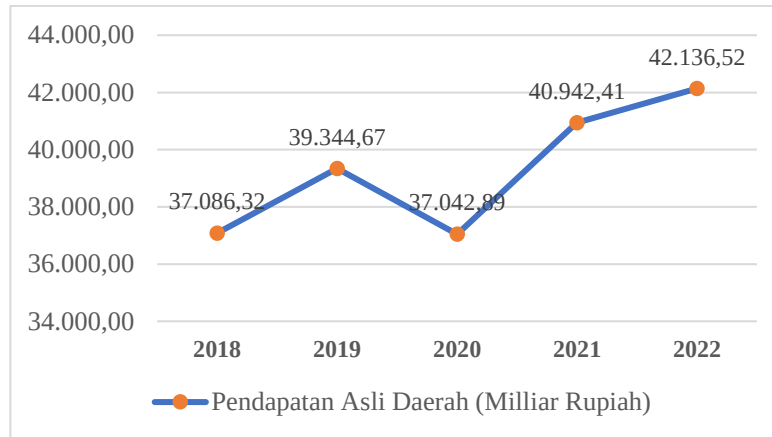
⁴ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), hlm. 139

⁵ Putu Ayu Krisna Dewi, Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali, *Jurnal Ilmiah*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28233/4/Chapter%20II.pdf>

Karena dapat menentukan kemampuan suatu daerah untuk melakukan pembangunan, belanja daerah, dan aktivitas pemerintah lainnya. Kemandirian bagi suatu daerah didalam merencanakan pembangunan merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi keuangan suatu daerah. Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dapat ditentukan dengan seberapa banyak jenis komponen pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang terdapat didalam suatu daerah tersebut. Sumber pendapatan asli daerah yang dimaksud adalah pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas-dinas, bantuan pemerintah baik pemerintah kota maupun daerah, serta berbagai macam pemberian lainnya.

Pada tahun 2021, Provinsi Jawa Timur berhasil menempati peringkat pertama nasional dalam hal realisasi Pendapatan Asli Daerah. Selama 2021, realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah mencapai total 40,942 triliun. Sedangkan pada tahun anggaran 2022 Provinsi Jawa Timur juga menunjukkan progress yang menggembirakan. Hal itu terbukti berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur mencapai 42,136 triliun. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur dalam periode satu lustrum atau periode tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik 1.6 di bawah ini:

Grafik 1.6
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2018-2022



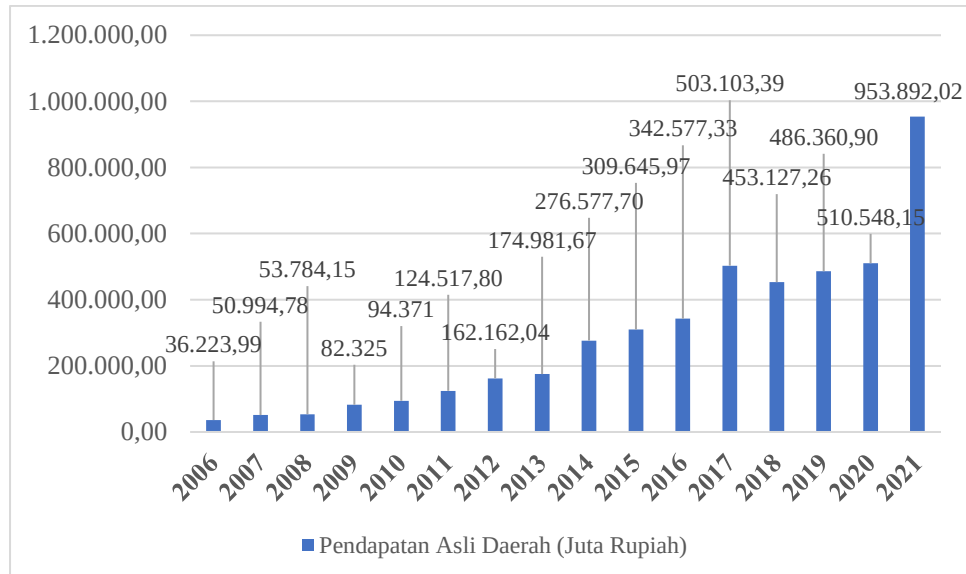
Sumber: DJPK Kemenkeu

Berdasarkan grafik 1.7 di atas, bahwa Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2018-2022. Pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dan pada tahun 2021 sampai 2022 pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menjadi menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor atau ekspor. Maksudnya, dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi merupakan peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek objek yang dikenakan pajak pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah,⁶ dalam hal ini di Kabupaten Tulungagung. Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2006-2021 Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

⁶ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta, 2007), hlm. 52

Grafik 1.7
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun Anggaran 2006-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung & BPKAD Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan grafik 1.7, bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2006-2021 yaitu, secara umum dari tahun ke tahun rata-rata mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun, pada tahun 2018 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung menunjukkan penurunan 49,98 miliar dari tahun sebelumnya yang realisasi pendapatannya 503,10 miliar pada tahun 2017, menjadi 453,13 miliar pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2021, Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung meningkat signifikan dari tahun sebelumnya, yang meningkat sebesar 46,48 persen dari tahun sebelumnya. Atas peningkatan tersebut, membuat pemerintah Kabupaten Tulungagung mendapatkan penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras daerah yang berhasil menunjukkan kinerja dan pengelolaan yang baik.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang taraf pertumbuhan ekonominya tergolong bertumbuh. Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan ekonomi, perlu disajikan suatu data statistik secara berkala, yang dapat digunakan sebagai

bahan perencanaan perberdayaan dan pembangunan kualitas hidup kesejahteraan masyarakat. Produk Domestik Bruto (PDB) atau bahasa Inggris disebut *Gross Domestic Product*, merupakan salah satu indikator penting mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi dan kinerja pembangunan di suatu negara dalam periode tertentu. Sedangkan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).⁷

Berdasarkan Data yang telah diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dibantu oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kabupaten Tulungagung, jumlah PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2006-2021 Kabupaten Tulungagung menunjukkan hasil positif pada setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.2 sebagai berikut:

⁷ BPS Kabupaten Tulungagung, *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung Tahun 2009-20013*, (Tulungagung: BPS Kabupaten Tulungagung, 2014) hlm. 2

Tabel 1.2
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Tulungagung Periode 2006-2022

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
2006	6.196,73
2007	6.552,88
2008	6.936,74
2009	7.353,50
2010	16.776,32
2011	17.845,22
2012	18.999,03
2013	20.144,38
2014	21.242,07
2015	22.326,62
2016	23.446,44
2017	24.637,36
2018	25.920,20
2019	27.299,80
2020	26.455,76
2021	27.390,42
2022	28.818,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

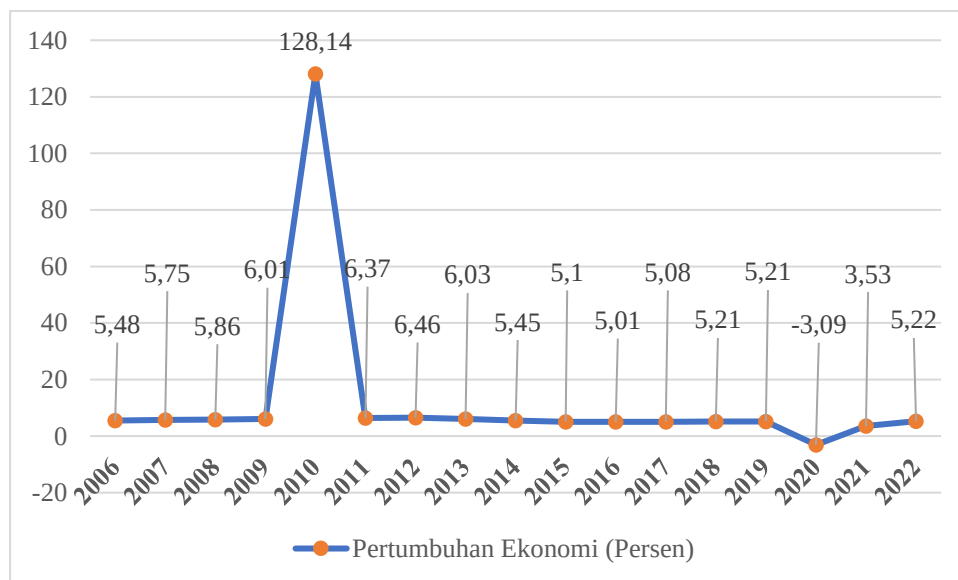
Berdasarkan grafik 1.2, dapat dilihat bahwa perkembangan nilai produk domestik regional bruto dasar (PDRB) menurut lapangan usaha di Kabupaten Tulungagung periode 2006-2022 yang telah dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Tulungagung pada halaman websitenya, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan PDRB terbesar yaitu terjadi di tahun 2010 dengan selisih peningkatan 9,42 triliun rupiah, yang bahkan nilai selisihnya lebih besar dari PDRB tahun sebelumnya 2009 yang hanya 7,35 triliun rupiah.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah

barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Mengukur pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, tentu dibutuhkan instrument untuk menghitungnya. instrument merupakan alat pengukur pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, data statistik yang diperlukan bukan PDRB atas dasar berlaku, melainkan adalah PDRB atas dasar harga konstan. Karena, harga berlaku akan dipengaruhi dengan inflasi pada tahun berjalannya sehingga menyebabkan harga berubah-ubah dengan mengikuti tingkat inflasi, oleh sebab itu perhitungan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah lebih baik jika menggunakan atas dasar harga konstan, dengan menghitung nilai barang dan jasa yang diproduksi pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasarnya. Jadi cara menghitung besaran pertumbuhan ekonomi, dapat menggunakan rumus pertumbuhan penduduk dengan hasil seperti pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.8
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Periode Tahun 2006-2021



Pada grafik 1.8 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2006 sampai tahun 2021 tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi paling besar terjadi pada tahun 2010, meningkat sebesar 128,14 persen dari tahun

sebelumnya. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi terjadi minus pada saat terjadi pandemi Covid-19 pada tahun 2020, yang menunjukkan anjloknya tingkat perekonomian daerah minus 3,09% dari tahun sebelumnya yang menunjukkan nilai positif 5,21 pada tahun 2019 disaat sebelum terjadi pandemi Covid-19. Tetapi 1 tahun setelah masuknya pandemi Covid-19 di Kabupaten Tulungagung, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung mengalami pertumbuhan positif. Tidak lagi di angka minus 3,09% seperti di tahun sebelumnya melainkan tumbuh positif di angka 3,53%.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari satu periode ke periode berikutnya. Menurut Sirojuzilam dan Mahalti pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilakukan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan 23 domestik Bruto (PDRB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian.⁸

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Pembangunan ekonomi meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Agar mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat meningkatkan kemampuan

⁸ Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan pemikiran ekonomi dasar teori pertumbuhan dan ekonomi pembangunan*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES indonesia, 1994), hlm. 2

masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya.⁹ Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menuntut pemerintah daerah agar melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yaitu dengan cara meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Era Otonomi Daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tapi benar-benar mempunyai kekuasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang selama era otonomi bisa dikatakan terpasung. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan kemampuan daerah. Terkait dengan hal itu, pemerintah daerah diharapkan semakin mendekatkan diri dalam berbagai kegiatan pelayanan publik guna meningkatkan tingkat kepercayaan, diharapkan tingkat partisipasi publik terhadap pemerintah daerah juga semakin tinggi.¹⁰

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah Laju Pertumbuhan Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung periode 2006-2022. Sehingga peneliti

⁹ Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Jakarta: Edisi Erlangga kedelapan, 2004).

¹⁰ Fitrah Afrizal, *Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Ternaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi Selatan*, (Makasar, 2012) hlm. 12

tertarik dengan judul “**Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Periode 2006-2022**”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah: Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tulungagung pada periode 2006-2022.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Laju Pertumbuhan Penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung periode 2006-2022?,
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung periode 2006-2022?,
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung periode 2006-2022?.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Laju Pertumbuhan Penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung periode 2006-2022.
2. Untuk mengetahui Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung periode 2006-2022.
3. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung periode 2006-2022.

E. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis

Dapat mengetahui implementasi *Gross Domestic Regional Product* atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai instrumen pengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan jiwa semangat berkerja dan membantu dalam meningkatkan perekonomian.

c. Bagi Pemerintahan

Dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam membuat kebijakan, khususnya kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Bagi Peneliti Mendatang

Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai pijakan penelitian secara mendalam yang berkaitan dengan tema penelitian yang relevan.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup serta batasan agar lebih terarah, fokus dan tidak keluar dari permasalahan yang akan dibahas. Yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah variable yang akan diteliti terdiri dari 3 variabel independen (X) dan 1 variabel dependen (Y). Adapun yang menjadi variabel bebas atau independen (X) dalam penelitian ini adalah Laju Pertumbuhan Penduduk (X_1), Indeks Pembangunan Manusia (X_2), & Pendapatan Asli Daerah (X_3). Sedangkan yang menjadi variabel terikat atau variable dependen (Y) dalam penelitian ini ialah Pertumbuhan Ekonomi

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan suatu batasan masalah yang bertujuan agar permasalahan yang akan diteliti lebih jelas dan terarah serta tidak keluar dari pembahasan yang ada. Adapun yang menjadi pembatasan penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian ini peneliti hanya terfokus meneliti apa saja faktor yang berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi yang dihitung dari nilai PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha yang

menjadi alat untuk mengukur tingkat produksi barang dan jasa pada suatu daerah (*regional*).

- b. Pembahasan variabel bebasnya meliputi rasio Laju Pertumbuhan Penduduk (*Population Growth*), Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*), dan Pendapatan Asli Daerah (*Local Government Revenue*) terhadap Pertumbuhan Ekonomi atau *Economic Growth* di Kabupaten Tulungagung yang biasa masuk pada data statistik ekonomi dan perdagangan periode tahun 2005-2022 yang telah diolah dan dirangkum oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda dan tidak mengalami kekaburan dalam memahami, akan diuraikan penjelasan beberapa istilah yang ada dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

- a. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara dua kekuatan yang menambah atau yang mengurangi jumlah penduduk. Perkembangan penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang dapat terjadi pada semua golongan umur. Dalam konteks spasial mobilitas penduduk juga berpengaruh terhadap perubahan dalam jumlah penduduk, dimana imigrasi akan menambah jumlah penduduk dan emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk dalam suatu wilayah.
- b. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator untuk mengetahui pembangunan ekonomi yang mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk, yaitu kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi.¹¹

¹¹ Suliswanto, Pengaruh produk domestik bruto (PDB) dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap angka kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Hlm 357-366.

- c. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.¹²
- d. Pertumbuhan Ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.¹³

2. Definisi Operasional

Penelitian dengan judul “Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Periode 2006-2022” bahwa penelitian yang dimaksud dengan Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Periode 2006-2022 adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh rasio Laju Pertumbuhan Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang dilihat dari masing-masing variabelnya maupun diuji secara simultan antara ketiga variabel bebas tersebut Laju Pertumbuhan Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Variabel terikat Pertumbuhan

¹² Audie O Niode, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap DAK, Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan, Skripsi, Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, (Manado, 2013)*, hlm. 247 - 248

¹³ Rahardjo, *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

Ekonomi. Agar hasil semakin maksimal, peneliti juga mengambil sampel data serta membandingkan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi variabelnya.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan laporan model penelitian kuantitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu:

1. Bagian awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.
2. Bagian utama, merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang mendukung dan sesuai dengan pembahasan. Dalam bab ini juga membahas tentang hasil penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan analisa atau perbandingan dalam membahas objek penelitian, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pendekatan penelitian dan jenis penelitian, populasi sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel, dan skala pengukuran, tehnik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada ini berisi tentang hasil penelitian yang berisi tentang diskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang berisi tentang pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

3. Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran- lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.